



Penerapan Model Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat

Mulyani Mahmud¹

¹ Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

E-mail: mulyani@ung.ac.id¹

Article History:

Received: 14 – 11 – 2023

Revised: 23 – 11 – 2023

Accepted: 26 – 11 – 2023

Abstract:

Pengabdian ini didasari oleh kurangnya pemahaman pengelola masjid, aparatur desa, dan Masyarakat tentang tahapan ataupun prosedur pengelolaan sumber dana yang terhimpun. Sehingga tujuan pengabdian ini untuk mengembangkan model manajemen keuangan masjid yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Masjid sebagai pusat keagamaan dan sosial di Masyarakat memegang peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan memadukan prinsip-prinsip manajemen keuangan modern dan nilai-nilai keislaman, diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di lingkungan masjid. Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif melibatkan pengurus masjid, tokoh Masyarakat, dan umat secara langsung. Implikasi hasil pengabdian ini dapat meningkatkan keberlanjutan keuangan masjid dengan diversifikasi sumber pendapatan. Keterlibatan umat dalam pengelolaan keuangan dapat menciptakan fondasi keuangan yang lebih stabil dan dapat menanggulangi fluktuasi pendapatan. Penerapan model ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. Melibatkan umat dalam proses pengambilan keputusan keuangan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Keywords:

*Manajemen
Keuangan Masjid,
Pemberdayaan
Ekonomi Umat*

Pendahuluan

Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, mencapai 86,7% dari total penduduk pada tahun 2022, yaitu sebanyak 237.558.000 jiwa dari total penduduk Indonesia. Secara nasional jumlah masjid di Indonesia diperkirakan sejumlah 740.000. Besarnya jumlah muslim di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan tempat ibadah, yakni masjid.

Peran masjid tidak hanya terbatas sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas umat Islam dalam berbagai aspek. Sejarah mencatat bahwa pada masa Rasulullah saw, masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, melainkan juga pusat peradaban dan kegiatan umat Islam, baik yang bersifat ibadah maupun non-ibadah.

Pertama-tama, masjid Quba, sebagai masjid pertama umat Islam, dibangun dengan sederhana. Rasulullah saw mengajak para sahabatnya untuk menggunakan bahan-bahan yang tersedia agar pembangunannya segera terselesaikan. Fokus pada substansi pembangunan menggarisbawahi pentingnya fungsi masjid sebagai pusat pembinaan dan pembangunan umat

di sekitarnya, bukan sekadar kemewahan atau besarnya bangunan.

Seiring kompleksitas permasalahan masyarakat, masjid diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan sosial. Oleh karena itu, manajemen dan pengelolaan masjid yang baik menjadi krusial. Pengelolaan masjid yang profesional diharapkan dapat membantu merebut kembali kejayaan Islam yang mungkin tereduksi oleh negara barat. Tanpa manajemen yang baik, masjid dapat menjadi monumen mati yang tidak mampu memancarkan semangat syiar dan penegakan risalah kerasulan.

Manajemen keuangan masjid memainkan peran penting dalam mendukung berbagai program. Dana masjid, yang sebagian besar berasal dari sumbangan jamaah, memerlukan pengelolaan yang efektif untuk mencegah kelalaian terhadap amanah. Keberhasilan program-program ini bergantung pada manajemen keuangan yang profesional dan efisien. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana masjid berasal dari donasi jamaahnya, Jika tidak dikelola dengan baik, maka sama saja pengurus masjid telah melalaikan amanah. Selain itu dari sudut pandang ekonomi, semakin banyaknya *idle asset*, sehingga menyalahi konsep uang dalam Islam, yaitu sebagai *flow concept* bukan *stock concept*. Jika tidak Dana masjid yang banyak melimpah harusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat sekitar masjid.

Pemberdayaan ekonomi umat melalui masjid menjadi kunci dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terdapat masjid dengan dana berlebih yang belum dioptimalkan, serta masjid progresif namun terbatas dana. Semua ini terjadi karena etos Islam yang mengajarkan, "Bukanlah muslim yang beriman yang makin kekenyangan sementara tetangganya kelaparan", tidak berkembang di kalangan pengurus masjid. Bahkan untuk sadar ke arah ini pun boleh jadi masih jauh dari pikiran. Ini menunjukkan pentingnya manajemen keuangan masjid untuk mendukung kepentingan umat secara menyeluruh.

Pentingnya manajemen keuangan masjid terlihat pada alokasi dana yang masih terfokus pada pembangunan fisik, tanpa memperhatikan kebutuhan dasar jamaah. Oleh karena itu, manajemen keuangan masjid yang baik dapat membantu mengalokasikan dana secara bijak untuk membantu mereka yang membutuhkan, serta memberikan bantuan kewirausahaan agar dapat keluar dari kemiskinan. Manajemen keuangan masjid masih belum optimal digunakan untuk aktivitas dakwah dan program-program produktif. Bisa jadi ini juga akibat dari masih banyaknya pengurus masjid yang menggunakan pola manajemen konvensional, termasuk dalam manajemen keuangan. Semua Desa memerlukan sosialisasi mengenai pengelolaan manajemen keuangan masjid untuk pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu desa yang belum memahami dan sadar akan pentingnya manajemen keuangan masjid ini adalah Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. bagaimana masjid mengelola sumber dana yang terhimpun serta guna memotret penggunaan dana yang bersifat produktif. Sebelumnya belum ada gambaran riil dan rinci tentang bagaimana pendanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban pengurus masjid yang didukung oleh aparat desa di Desa Pentadio Barat. Maka perlu adanya pelatihan penerapan model manajemen keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat.

Masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi umat. Desa Pentadio Barat memiliki potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan melalui pengelolaan keuangan masjid yang baik. Pemberdayaan ekonomi umat melalui masjid diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat.

Metode

Model manajemen keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat adalah suatu pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen keuangan modern dengan nilai-nilai keislaman untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di sekitar masjid. Berikut adalah beberapa elemen utama dari model ini:

1. Partisipatif dan Inklusif:

Model ini mendorong partisipasi aktif umat, pengurus masjid, dan tokoh Masyarakat dalam pengambilan keputusan keuangan. Keputusan keuangan yang melibatkan umat dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, memperkuat keterlibatan komunitas

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Fokus utama dari model ini adalah memberdayakan ekonomi umat. Ini dapat mencakup inisiatif-inisiatif seperti pendirian usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau proyek ekonomi yang melibatkan umat secara langsung.

3. Diversifikasi Sumber Pendapatan

Model ini mendorong masjid untuk diversifikasi sumber pendapatan mereka. Selain sumbangan umat, masjid dapat mencari sumber pendapatan tambahan melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Penerapan Prinsip Keuangan Islam

Dalam manajemen keuangan, model ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan Islam seperti zakat, wakaf, dan prinsip keuangan syariah lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan keuangan masjid sesuai dengan nilai-nilai agama.

5. Pelatihan dan Pendidikan Keuangan

Model ini mencakup upaya pelatihan dan pendidikan keuangan kepada umat dan pengurus masjid. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya manajemen keuangan yang baik dan nilai-nilai ekonomi Islam.

6. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Model ini menekankan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid. Informasi keuangan harus tersedia secara terbuka untuk umat, dan proses pengambilan keputusan keuangan harus dilakukan secara akuntabel.

7. Pengembangan Inisiatif Sosial dan Ekonomi

Masjid dapat mengembangkan inisiatif sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi Masyarakat sekitar. Ini dapat mencakup program Kesehatan, pendidikan, atau proyek-proyek ekonomi yang mendukung pembangunan Masyarakat.

8. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Model ini melibatkan proses monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan implementasi. Dengan memantau kinerja keuangan dan dampak sosial ekonomi, masjid dapat terus mengoptimalkan model manajemen keuangannya.

Penerapan model manajemen keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,

sekaligus mempekuat peran masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial komunitas. Sehingga pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif melibatkan pengurus masjid, tokoh Masyarakat, dan umat secara langsung. Survei dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data terkait manajemen keuangan masjid dan potensi ekonomi umat. Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan konsep manajemen keuangan dan prinsip ekonomi islam. Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian adalah para pengelola masjid, aparatur desa, dan masyarakat Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.

Metode penerapan Iptek yang digunakan dalam kegiatan dalam bentuk pelatihan ini, yaitu *Pertama*. Metode ceramah digunakan oleh narasumber untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan manajemen keuangan masjid. *Kedua*, Metode diskusi/Tanya Jawab digunakan untuk memperdalam materi bahasan yang disampaikan.

Evaluasi dalam kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni :

1. Tahap perencanaan kegiatan. Pada awal kegiatan ini, pemateri menjelaskan tentang model manajemen keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat yang menitik beratkan pada 4 (empat) topik pembahasan, yakni partisipatif dan iklusifitas pengelolaan keuangan masjid, pemberdayaan ekonomi umat, diversifikasi sumber pendapatan, dan penerapan prinsip keuangan islam,
2. Tahap selama proses kegiatan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan peserta diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab.
3. Tahap akhir kegiatan. Evaluasi pada akhir kegiatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari seluruh program pelatihan ini.

Hasil

Model manajemen keuangan masjid yang diterapkan berfokus pada transparansi keuangan, pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), serta pengembangan usaha ekonomi umat. Melalui program pelatihan dan pendampingan. Umat diajak untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan ini diikuti oleh 34 orang peserta yang terdiri dari pengelola keuangan masjid, aparatur desa, dan masyarakat. Pemilihan Desa Pentadio Barat sebagai lokus tempat pengabdian didasari bahwa Desa Pentadio Barat belum memahami manajemen keuangan masjid. Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dalam dua tahapan, yakni Tahap awal pelatihan dilakukan dengan penyajian materi oleh para narasumber kepada para peserta. Adapun materi yang diberikan meliputi pentingnya pemahaman dasar tentang manajemen keuangan masjid dan tata cara pengelolaan manajemen keuangan masjid.

Pemahaman dasar tentang manajemen keuangan masjid memiliki signifikansi yang besar, tidak hanya bagi pengurus masjid, tetapi juga bagi umat dan komunitas secara keseluruhan. Pemahaman dasar tentang manajemen keuangan membantu memastikan keberlanjutan keuangan masjid. Dengan mengetahui cara mengelola sumber daya keuangan dengan efektif, masjid dapat menghindari masalah keuangan yang dapat mengancam kelangsungan operasional dan kegiatan masjid.

Selanjutnya, pemahaman dasar tentang manajemen keuangan membantu pengurus masjid dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Ini termasuk alokasi anggaran yang efisien, pengelolaan keuangan yang bijaksana, dan penentuan prioritas yang

sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masjid. Disamping itu, masjid dapat mengembangkan inisiatif ekonomi yang memberdayakan umat. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan masjid untuk memberikan dukungan finansial kepada proyek-proyek pemberdayaan ekonomi, seperti usaha kecil dan program pelatihan keterampilan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid menciptakan kepercayaan diantara umat. Pemahaman tentang laporan keuangan dan alokasi dana memberikan keyakinan bahwa dana umat digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang diumumkan. Dengan pemahaman dasar tentang manajemen keuangan ini, masjid dapat menjadi entitas yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi secara positif pada kesejahteraan umat dan pembangunan komunitas

Pada tahap kedua, penggunaan metode diskusi dilakukan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan tentang materi yang telah diberikan. Hasil diskusi dengan para peserta menunjukkan sebagian peserta mudah memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber terkait dengan materi yang disampaikan. Pada tahapan berikut, melakukan evaluasi kegiatan. Salah satunya dengan cara mengadakan tanya jawab dengan peserta berkaitan dengan isi materi yang telah disampaikan. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta yang mencerminkan permasalahan umum yang dihadapi oleh pengurus masjid dan umat dalam konteks manajemen keuangan, yakni :

1. Bagaimana cara diversifikasi sumber pendapatan masjid secara efektif ?

Pertanyaan ini menggambarkan bahwa peserta umumnya ingin memahami langkah-langkah konkret untuk mendiversifikasi sumber pendapatan masjid. Ini termasuk ide-ide untuk kegiatan penggalangan dana, program-program ekonomi umat, atau cara memanfaatkan aset masjid secara lebih efisien.

2. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi umat dalam pengelolaan keuangan masjid?

Pertanyaan ini menggambarkan bahwa peserta ingin mengetahui strategi untuk meningkatkan keterlibatan umat dalam pengelolaan keuangan masjid. Ini bisa mencakup pelatihan, penyuluhan, atau pengembangan model yang inklusif untuk memungkinkan umat terlibat aktif.

3. Bagaimana cara mengelola keuangan masjid dengan efektif agar dapat mendukung proyek-proyek pemberdayaan ekonomi umat?

Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep pengelolaan keuangan yang dapat mendukung proyek-proyek pemberdayaan ekonomi umat. Peserta ingin mencari panduan yang konkret tentang cara mengalokasikan dana untuk proyek-proyek ini tanpa mengorbankan keberlanjutan keuangan masjid.

4. Bagaimana cara mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam manajemen keuangan masjid?

Pertanyaan ini menggambarkan peserta ingin mengetahui dan membutuhkan panduan praktis tentang cara mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti zakat dan wakaf, dalam manajemen keuangan sehari-hari masjid.

5. Bagaimana mengatasi tantangan dalam pengelolaan keuangan, seperti fluktuasi pendapatan atau kurangnya transparansi keuangan?

Pertanyaan ini menyoroti tantangan umum yang dihadapi oleh masjid. Dalam hal ini, menggambarkan bahwa peserta ingin mencari solusi praktis untuk mengatasi masalah seperti fluktuasi pendapatan atau kurangnya transparansi dalam laporan keuangan masjid.

6. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masjid dan kebutuhan sosial dan keagamaan umat?

Pertanyaan ini menggambarkan bahwa peserta ingin memahami strategi untuk menjaga keseimbangan yang baik antara mendukung kebutuhan ekonomi masjid dan memenuhi kebutuhan sosial dan keagamaan umat.

7. Apa Langkah-langkah praktis untuk meningkatkan transparansi keuangan masjid?

Peserta dapat mencari panduan konkret untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan masjid, termasuk cara menyusun laporan keuangan yang mudah dimengerti oleh umat.

8. Bagaimana cara mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi model manajemen keuangan berbasis ekonomi umat?

Pertanyaan ini menggambarkan peserta ingin memahami indikator kinerja dan metode evaluasi untuk menilai apakah model manajemen keuangan yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pelatihan manajemen keuangan masjid dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan solusi praktis bagi peserta, membantu mereka mengimplementasikan model yang lebih efektif dalam konteks masjid mereka.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan

Diskusi

Penerapan model manajemen keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat memiliki beberapa implikasi yang signifikan, baik bagi masjid itu sendiri maupun untuk umat yang terlibat. Berikut ini adalah beberapa implikasi dari penerapan model tersebut:

1. Keberlanjutan Keuangan Masjid

Model ini dapat meningkatkan keberlanjutan keuangan masjid dengan diversifikasi sumber pendapatan. Keterlibatan umat dalam pengelolaan keuangan dapat menciptakan fondasi keuangan yang lebih stabil dan dapat menanggulangi fluktuasi pendapatan.

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Model ini memberikan peluang pemberdayaan ekonomi umat melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan pengelolaan keuangan masjid. Umat dapat terlibat dalam pengembangan usaha-usaha kecil, program-program pelatihan, atau proyek-proyek ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas.

3. Transparasi dan Akuntabilitas

Penerapan model ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. Melibatkan umat dalam proses pengambilan keputusan keuangan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel.

4. Peningkatan Keterlibatan Umat

Model ini mendorong keterlibatan aktif umat dalam kegiatan masjid, tidak hanya dari segi ibadah, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap masjid serta memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

5. Peningkatan Infrastruktur dan layanan.

Dengan keuangan yang lebih terkelola dengan baik, masjid dapat meningkatkan infrastruktur dan layanan yang diberikan kepada umat dan Masyarakat. Hal ini dapat mencakup perbaikan fisik bangunan masjid, peningkatan fasilitas, serta penyediaan layanan sosial dan pendidikan.

6. Pengembangan Inisiatif Sosial dan Ekonomi

Masjid dapat mengembangkan inisiatif sosial dan ekonomi yang lebih luas untuk mendukung Masyarakat sekitar. Ini bisa mencakup program Kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan usaha-usaha ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang kepada umat dan Masyarakat.

7. Peran Masjid dalam Pembangunan Masyarakat

Dengan model manajemen keuangan yang inklusif, masjid dapat menjadi agen Pembangunan Masyarakat. Dengan mengatasi masalah ekonomi, masjid dapat berkontribusi secara aktif pada perkembangan sosial dan ekonomi Masyarakat yang lebih luas.

Penerapan model manajemen keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat, jika dilaksanakan dengan baik, dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masjid dan Masyarakat yang dilayani. Dengan penerapan model ini, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi tempat yang menggerakkan ekonomi umat.

Masjid mempunyai kaitan erat dengan keimanan dan pembinaan umat bagi kaum muslimin agar dapat memberikan peranan yang dominan dalam pembangunan negara. Kekuatan iman inilah yang menentukan persatuan umat yang akan memberikan kekuatan lahir batin dalam memperjuangkan nasib masyarakat Islam yang berdasarkan tauhid.

Mustofa (2007) mengemukakan beberapa fungsi masjid, yaitu : (1) Sebagai wahana konsultasi keagamaan, masalah keluarga, dan masalah sosial; (2) Sebagai wahana pengembangan pendidikan Masyarakat; (3) Sebagai wahana pengembangan bakat dan keterampilan; (4) Sebagai wahana pengentasan kemiskinan; (5) Sebagai wahana meringankan beban orang kurang mampu. (6) Sebagai wahana pembinaan generasi muda; (7) Sebagai

wahana mitra pengembangan perekonomian Masyarakat; (8) Sebagai wahana menyehatkan masyarakat.

Dalam sejarah dakwah Rasulullah saw, terutama selama periode Madinah, masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah dengan tujuan khusus, seperti shalat. Masjid juga memainkan beberapa peran penting. Pertama, dalam situasi darurat setelah mencapai hijrah ke Madinah, Rasulullah saw tidak langsung mendirikan benteng pertahanan untuk mengantisipasi serangan musuh, melainkan memprioritaskan pendirian masjid. Kedua, kalender Islam dimulai dengan mendirikan masjid pertama pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang menandai awal tahun hijriah; tanggal ini kemudian menjadi titik awal setiap tahun hijriah berikutnya, dimulai pada 1 Muharam. Ketiga, di Makkah, Islam tumbuh, sementara di Madinah, Islam berkembang. Pada fase awal Makiyah, Nabi Muhammad saw mengajarkan prinsip-prinsip dasar agama, dan pada fase Madaniyah, Rasulullah saw menandai batas tersebut dengan mendirikan masjid. Keempat, masjid memperkuat ikatan antara kelompok Muhajirin dan Anshar dengan fondasi keimanan kepada Allah swt. Kelima, pendirian masjid melibatkan kontribusi bersama dari individu yang bertaqwa untuk mencapai kebaikan bersama.

Manajemen masjid mencakup kegiatan yang melibatkan unsur dan fungsi dalam pelaksanaan segala aktivitas yang mencerminkan ketaatan kepada Allah melalui ibadah dalam segala bentuknya (Ayub, 1996). Untuk memenuhi peran dan fungsi tersebut, diperlukan sumber dana yang cukup signifikan. Merawat dan mengelola masjid, serta menyelenggarakan kegiatan di dalamnya, hanya dapat terwujud apabila tersedia dana yang memadai. Tanpa ketersediaan dana, hampir semua rencana untuk memajukan masjid akan sulit dilaksanakan.

Manajemen keuangan di lingkungan masjid mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana dengan tujuan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mencapai efisiensi serta efektivitas penggunaan dana. Secara sederhana, manajemen keuangan masjid melibatkan strategi dari pengurus masjid dalam mengumpulkan dan mengelola dana dengan cara yang terorganisir, terukur, dan terkendali untuk kepentingan umat (Harahap, 1993).

Ruang lingkup manajemen keuangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga fungsi, yaitu:

- 1) Merencanakan atau menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) atau budgeting, yang mencakup estimasi dana yang diharapkan terhimpun beserta sumber dan strategi perolehannya, alokasi dana yang akan disalurkan, jumlah penerima dana, dan saldo minimum yang harus dipertahankan sebagai cadangan setiap bulan.
- 2) Membuat panduan berupa kebijakan umum dan petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan dana yang akan dilaksanakan di lembaga. Panduan ini harus mencakup penghimpunan, penyaluran, dan saldo dana.

a) Penghimpunan Dana

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola. Jenis dana yang lazim ada di masyarakat dan sesuai undang-undang pengelolaan zakat adalah zakat, infaq, sedekah, wasiat, waris, kafarat, wakaf, hibah lembaga lain, hibah dari pemerintah, dan hibah dari luar negeri. Cara penerimaan dana masjid juga harus diperhatikan. Ada tiga cara dana diterima: melalui rekening di bank, langsung di masjid, dan “jemput bola”, yaitu pengelola datang langsung kepada pemberi dana.

b) Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- (1) Penerima/pengguna dana
 - (2) Tujuan penggunaan
 - (3) Bentuk dan sifat penggunaan, apakah konsumtif ataukah produktif.
- c) Prosedur Pengeluaran Dana

Pengeluaran dana harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, perlu melibatkan beberapa pihak dalam prosedur pengeluaran dana, yakni:

- (1) Pengguna dana, yaitu pihak yang mengajukan permintaan dana.
 - (2) Verifikator dan otorisator, yakni pihak yang berhak memverifikasi dan menyetujui pengeluaran dana.
 - (3) Kasir, yakni pihak yang bertindak sebagai juru bayar.
- d) Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana

Setiap pengeluaran dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis, lengkap, dan sah. Sekecil apapun dana yang dikeluarkan. Pertanggungjawaban harus diberikan dalam batas waktu tertentu.

- 3) Melakukan pengendalian dalam penghimpunan, penyaluran, dan saldo dana. Pengendalian keuangan ini meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unit atau orang penanggung jawab keuangan

Dalam organisasi, baik besar atau kecil, harus ada unit atau orang tertentu yang menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Tidak boleh terjadi setiap orang bertindak sebagai bendahara. Uang masuk dan keluar hanya dilakukan satu pintu.

- b) Anggaran

Anggaran merupakan alat pengendalian. Anggaran dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau alat pembanding dalam mengevaluasi kegiatan.

- c) Kebijakan

Kebijakan yang jelas dapat menghindarkan pengeluaran dan penggunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten.

- d) Pelaporan

Pelaporan dan publikasi merupakan sarana pengendalian keuangan yang melibatkan bukan hanya atasan melainkan seluruh masyarakat.

- e) Pencatatan

Dengan pencatatan maka setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri.

- f) Prosedur

Setiap penerimaan atau pengeluaran harus melalui prosedur untuk menghindari penerimaan atau pengeluaran yang tidak sesuai.

- g) Personalia

Pengelola yang amanah dan profesional merupakan unsur utama dalam pengendalian. Sebaik apapun unsur-unsur yang lain tidak akan banyak berarti tanpa pengelola yang memiliki aiqadah yang lurus dan akhlak yang mulia.

h) Audit Internal

Audit internal dapat menghindarkan penyimpangan-penyimpangan karena kelalaian maupun kesengajaan baik terkait dengan syariah maupun etika umum yang berlaku di masyarakat.

Pemberdayaan Umat di Bidang Ekonomi

Pemberdayaan adalah usaha yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi hidup manusia. Pemberdayaan seharusnya diarahkan untuk mencapai standar kehidupan ekonomi yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan manusia. Pemberdayaan ekonomi, pada hakikatnya, telah diimplementasikan oleh Rasulullah dan khalifah pada zamannya dengan maksud mencapai *falah*, yakni kesejahteraan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik manusia tetapi juga kebutuhan rohani. Dalam upaya mencapai *falah*, diperlukan strategi sebagai alat untuk mewujudkannya. Strategi pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan perekonomian umat.

Ife (1997) mendefinisikan bahwa pemberdayaan sebagai upaya penyediaan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka dapat meningkatkan kapasitasnya dan mencapai perbaikan dalam masa depan mereka. Sedangkan Sumohadiningrat (1997) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan usaha untuk memperkuat potensi yang dimiliki oleh kelompok *dhuafa* dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dalam konteks pemberdayaan, terdapat suatu proses yang bertujuan membuat masyarakat memiliki kemampuan dengan dukungan atau bantuan dari pihak lain. Secara logis, masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kemandirian dalam membuat pilihan dan memiliki peluang untuk mengambil keputusan. Pada akhirnya, pemberdayaan akan menciptakan dan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan manusia yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas pilihan dalam hidupnya dianggap sebagai manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dari sebelumnya.

Sheraden (1991) menjelaskan bahwa terdapat setidaknya tiga domain pemberdayaan yang saling terkait. Pertama, domain aset manusia (*human asset*), yang berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Aset manusia ini termasuk dalam kategori aset yang tidak berwujud. Secara umum, aset manusia mencakup kecerdasan, latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan elemen lainnya. Upaya untuk meningkatkan aset manusia ini umumnya dilakukan melalui program-program kualitatif seperti pelatihan dan kursus-kursus keterampilan, serta penyuluhan, yang semuanya bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan kualitas SDM. Kedua, pemberdayaan aset keuangan (*financial assets*), yang melibatkan modal produksi seperti tanah, bangunan, mesin produksi, dan komponen produksi lainnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku ekonomi adalah kesulitan dalam mendapatkan modal usaha. Kendala ini disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketidakpastian mereka dalam memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal, seperti bank,

sehingga menyulitkan realisasi dana usaha. Ketiga, pemberdayaan aset sosial (*social assets*), yang mencakup keluarga, teman, rekan kerja, serta jaringan sosial dalam bentuk dukungan emosional, informasi, dan akses yang memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan, kredit, dan jenis aset lainnya.

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam adalah suatu model konkret pengembangan perilaku individu dan kelompok dalam konteks amal soleh (perbuatan baik), dengan fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Proses pemberdayaan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri dan diimplementasikan secara berkelanjutan, progresif, dan bertahap. Strategi dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem ekonomi yang dikejar pada dasarnya mencerminkan pandangan dunia yang bersumber dari pertimbangan-pertimbangan tentang asal mula alam semesta, makna tujuan hidup manusia, prinsip kepemilikan, alasan manusia memiliki sumber daya, dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya.

Azwar (2014) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu:

1) Penyadaran

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Mereka harus sadar bahwa proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka.

2) Pengkapsitasan (*capacity buliding*)

Untuk diberikan daya atau kuasa, target yang diberdayakan harus mampu terlebih dahulu. Proses ini terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapsitasan manusia dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Pengkapsitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Sedangkan pengkapsitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu target dan aturan main di antara mereka sendiri.

3) Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecapakan yang telah dimiliki.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu proses atau mekanisme di mana individu, organisasi, dan masyarakat menjadi kompeten dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Pemberdayaan menekankan peran dan partisipasi masyarakat sepanjang siklus perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.

Umat merupakan bagian integral dari masyarakat, khususnya umat Islam, yang didefinisikan sebagai sekelompok individu yang berbagi keyakinan dan tujuan hidup yang serupa, serta terikat oleh kesepakatan iman yang sama. Pemberdayaan umat mencakup pemberdayaan masyarakat, dengan fokus yang lebih khusus pada lingkup umat Islam. Tujuan pemberdayaan umat ini adalah mencapai kesejahteraan, yang didefinisikan sebagai kondisi di mana kebutuhan individu atau komunitas dapat terpenuhi melalui sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, individu atau masyarakat yang sejahtera dapat diartikan sebagai mereka yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka melalui berbagai sumber daya di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan umat

mencerminkan usaha untuk memenuhi kebutuhan umat melalui kegiatan yang diorganisir oleh pengurus masjid tertentu.

Praktik pemberdayaan dalam ranah ekonomi saat ini melibatkan beberapa aspek, seperti: (1) pemberian modal bergulir; (2) bantuan pembangunan infrastruktur; (3) pengembangan lembaga lokal; (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) pendampingan eksekutif (Azis, 2005). Pemberdayaan ekonomi umat mengimplikasikan pengoptimalkan segala potensi yang dimiliki oleh umat untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mencapai tujuan hidup yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan secara efektif melalui peran aktif masjid-masjid, yang memiliki kelebihan dana rata-rata per bulannya. Masjid seharusnya tidak hanya menjadi simbol ritual dalam komunitas Islam, melainkan juga menjadi elemen integral dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi.

Kesimpulan

Penerapan model manajemen keuangan masjid yang diterapkan berfokus pada transparansi keuangan, pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), serta pengembangan usaha ekonomi umat. Melalui program pelatihan dan pendampingan. Umat diajak untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo atas dukungannya sehingga program pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dan didanai secara mandiri oleh penulis. Artikel ini merupakan salah satu luaran program Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023

Daftar Referensi

- Ayub, M. E. (1996). *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, Yogyakarta: Gema Insani Press.
- Aziz, M. A. (2005). “Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat”, dalam Suhartini, dkk (ed.), *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Azwar, B. (2014). Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar (Studi Tentang Efektifitas Bantuan Dana Bergulir Sektor Agribisnis). *Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau*.
- Harahap, S. (1993). *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ife, Jim. (1997). *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*. Australia: Longman.

- Mustofa, B. (2007). *Manajemen Masjid*. Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Sherraden, M. (1991). *Assets and The Poor: A New American Welfare Policy*. Armonk: M.E. Sharpe
- Sumohadiningrat, G. (1997). *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.